

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh belanja pemerintah terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) bidang pendidikan di Indonesia, dengan fokus pada indikator tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat. Belanja pemerintah yang dianalisis meliputi belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi perlindungan sosial. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol seperti pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan. Berdasarkan analisis data panel dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja fungsi pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap SDGs bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dana pendidikan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan tingkat penyelesaian pendidikan menengah atas. Ketidaksignifikan ini mengindikasikan adanya masalah dalam alokasi, implementasi dan terkait dengan ketidaktepatan sasaran.
2. Belanja fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap SDGs bidang pendidikan. Kesehatan yang baik terbukti mendukung proses belajar yang optimal. Peningkatan alokasi anggaran kesehatan, khususnya untuk program-program yang mendukung status gizi dan kesehatan anak, berdampak langsung pada peningkatan kemampuan akademik dan penyelesaian pendidikan.
3. Belanja fungsi perlindungan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap SDGs bidang pendidikan. Meskipun belanja fungsi perlindungan sosial dan program sosial dari pemerintah memiliki tujuan mendukung keberlanjutan pendidikan, implementasi dan realisasinya masih terhambat oleh masalah ketidaktepatan sasaran, besaran bantuan yang belum memadai, serta lemahnya integrasi antara kebijakan sosial dan pendidikan.
4. Pendapatan per kapita sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap SDGs bidang pendidikan. Pendapatan per kapita yang lebih

tinggi memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dengan lebih baik, sehingga meningkatkan angka penyelesaian pendidikan.

5. Kemiskinan sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh negatif terhadap SDGs bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang menghambat akses dan keberlanjutan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam memperluas akses pendidikan dan mencapai target pembangunan berkelanjutan di sektor pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat efektivitas belanja pendidikan melalui perencanaan program yang lebih berbasis kebutuhan lokal, peningkatan kualitas manajemen pendidikan, dan pengurangan dominasi belanja non-produktif seperti belanja pegawai. Monitoring dan evaluasi berbasis kinerja juga harus ditingkatkan untuk memastikan output yang maksimal dari anggaran yang telah dikeluarkan.
2. Belanja kesehatan harus terus ditingkatkan dan diintegrasikan dengan program pendidikan, terutama yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan anak usia sekolah. Intervensi kesehatan yang tepat dapat secara tidak langsung mendorong pencapaian tujuan pendidikan melalui peningkatan kemampuan belajar dan pengurangan angka putus sekolah.
3. Program perlindungan sosial perlu ditingkatkan akurasi dan integrasinya dengan sistem pendidikan. Penyesuaian besaran bantuan, peningkatan akuntabilitas distribusi, serta pelibatan sekolah dalam monitoring perlu dilakukan agar bantuan sosial benar-benar berdampak pada penyelesaian pendidikan.
4. Peningkatan pendapatan rumah tangga harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah, karena daya beli yang lebih tinggi terbukti

mendorong keberhasilan pendidikan. Penguatan ekonomi keluarga akan menciptakan kondisi yang mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak.

5. Pemerintah perlu memperluas dan memastikan ketepatan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak-anak dari keluarga miskin, agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA/ sederajat tanpa terbebani masalah biaya.
6. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggali aspek kualitatif dan mikro dari hubungan antara variabel-variabel fiskal dan capaian pendidikan, serta mengeksplorasi perbedaan pengaruh antar wilayah atau kelompok sosial ekonomi, agar kebijakan yang dihasilkan lebih presisi dan inklusif.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan di antaranya yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan data agregat tingkat provinsi yang bersifat makro dan tidak menggambarkan dinamika yang terjadi pada level rumah tangga atau individu. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat menjelaskan secara rinci mekanisme yang terjadi di tingkat mikro terkait keputusan untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA/ sederajat.
2. Penelitian ini belum melakukan analisis lebih lanjut terkait perbedaan antar wilayah, seperti perbedaan antara provinsi maju dan tertinggal, daerah perkotaan dan pedesaan, atau wilayah dengan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan yang berbeda-beda.
3. Variabel belanja pemerintah yang digunakan terbatas hanya pada tiga fungsi (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial), sehingga belum mengakomodasi belanja lain yang secara tidak langsung juga relevan terhadap pendidikan.
4. Belanja fungsi kesehatan tidak lagi menjadi *mandatory spending* (belanja wajib) sejak tahun 2023 (berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Oleh sebab itu, terdapat perubahan besaran alokasi anggaran.

Perubahan ini berpotensi menciptakan inkonsistensi alokasi belanja kesehatan antar daerah dan tahun. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan periode analisis antara sebelum dan sesudah perubahan regulasi agar analisis dampak belanja kesehatan terhadap pendidikan lebih akurat, mengingat terdapat perbedaan kerangka regulasi yang mendasari pengalokasian anggaran.

5. Peneliti selanjutnya juga dapat mengeksplorasi perbedaan respons antar daerah terhadap perubahan regulasi *mandatory spending* kesehatan, karena sejak 2023 pengalokasian anggaran sangat bergantung pada prioritas fiskal daerah masing-masing. Ini membuka ruang untuk analisis perbandingan antar wilayah (misalnya, daerah dengan fiskal kuat dengan fiskal lemah).

